

Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Studi Kasus di SD Negeri Balekambang 01 Pagi Kecamatan Kramat Jati

Arief Nurul Firdaus^{1*}, Mohammad Mulyadi²

^{1,2} Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

Email : ¹ariefnurulfirdaus@gmail.com, ²moha078@brin.go.id

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

Article history :

Received : Februari 21, 2025

Revised : Maret 2, 2025

Accepted : Maret 10, 2025

Kata Kunci:

Policy Implementation;

Zoning System;

New Student Admission (PPDB).



Copyright (c) 2025

Jurnal Reformasi Administrasi:

Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan

Masyarakat Madani

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the zoning system policy in New Student. Admissions (PPDB) at State Elementary School of Balekambang 01 Pagi, Kramat Jati District, based on George Edward III's theory. This policy is based on the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology Regulation No. 1 of 2021, the Special Region of Jakarta Governor Regulation No. 15 of 2024, and Decree of the Head of the Special Region of Jakarta Provincial Education Office No. 92 of 2024. This study examines the success of policy implementation through the four key elements of Edward III's theory: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate that the policy implementation has supported the equitable access to education; however, several challenges were identified, including suboptimal policy socialization, limited school facility capacity, and resistance from the community. The solutions implemented by the school include enhancing socialization efforts, utilizing a digital system for registration, and proposing infrastructure capacity improvements. This study also provides recommendations to improve the effectiveness of the zoning policy, such as improving cross-sector communication, increasing school capacity, and ensuring equitable quality education. These findings have important implications for the future development of the zoning policy to create more inclusive and equitable access to education.

PENDAHULUAN

Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan. Sistem ini mengatur agar penerimaan siswa baru didasarkan pada jarak tempat tinggal siswa dengan sekolah, bukan semata-mata pada nilai akademis. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi disparitas kualitas pendidikan antar sekolah dan memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke wilayah yang jauh dari tempat tinggalnya.

Sebelum diterapkannya sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), mekanisme seleksi umumnya berbasis pada nilai ujian nasional (UN). Sistem ini dianggap lebih objektif karena siswa diterima berdasarkan prestasi akademiknya. Namun, penerapan sistem ini juga memunculkan berbagai permasalahan, yang kemudian menjadi alasan utama diterapkannya sistem zonasi.

Sistem seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) sebelum penerapan sistem zonasi cenderung berfokus pada prestasi akademik, sehingga memunculkan persaingan ketat antar calon siswa. Menurut Mulyadi (2020), sistem ini secara efektif mendorong siswa untuk berprestasi, namun secara tidak langsung memperbesar kesenjangan pendidikan karena sekolah-sekolah unggulan hanya diisi oleh siswa dari kalangan tertentu yang memiliki akses lebih baik ke sumber daya pendidikan. Hal ini diperkuat oleh penelitian dari Rahman dan Santoso (2021), yang menunjukkan bahwa sistem berbasis nilai lebih menguntungkan siswa dari keluarga mampu, sementara siswa dari wilayah terpencil atau kurang mampu memiliki peluang yang lebih kecil. Sebaliknya, Suryani (2022) menyoroti bahwa sistem lama tersebut sering kali mengabaikan aspek pemerataan pendidikan, sehingga kualitas pendidikan terpusat di beberapa sekolah saja. Dengan demikian, meskipun sistem seleksi berbasis prestasi

memiliki keunggulan dalam meningkatkan motivasi belajar, kelemahannya dalam menciptakan kesetaraan akses pendidikan menjadi salah satu alasan penting diterapkannya sistem zonasi. Sistem seleksi berbasis nilai lebih mengutamakan keadilan individual, sedangkan sistem zonasi lebih menekankan keadilan sosial. Namun, efektivitas keduanya sangat bergantung pada implementasi yang baik dan dukungan infrastruktur. Idealnya, perlu ada kombinasi dari kedua sistem ini—seperti menambahkan jalur prestasi dalam sistem zonasi—agar tercipta keseimbangan antara pemerataan akses pendidikan dan penghargaan terhadap prestasi.

Implementasi sistem zonasi dalam PPDB tidak berjalan tanpa tantangan. Beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain, Ketidakpuasan Masyarakat, Banyak orang tua merasa tidak puas karena anak-anak mereka tidak diterima di sekolah yang diinginkan meskipun memiliki prestasi akademis yang baik. Mereka merasa bahwa sistem ini membatasi pilihan dan peluang anak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Ketidakmerataan Akses, Meskipun sistem zonasi bertujuan untuk pemerataan, kenyataannya masih terdapat ketidakmerataan akses pendidikan. Sekolah-sekolah di daerah tertentu mungkin memiliki fasilitas dan kualitas pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan sekolah di daerah lainnya. Hal ini menyebabkan perbedaan yang signifikan dalam kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa di berbagai zona. Masalah Administratif, Dalam praktiknya, implementasi sistem zonasi seringkali mengalami kendala administratif seperti kesalahan dalam pendataan alamat siswa, penentuan zona yang tidak akurat, dan kurangnya koordinasi antara pihak sekolah dengan pemerintah daerah.

Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) telah menjadi salah satu kebijakan yang paling banyak dibicarakan dalam dunia pendidikan Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pemerataan akses pendidikan dengan mendasarkan penerimaan siswa baru pada jarak tempat tinggal siswa dengan sekolah. Meskipun demikian, fenomena yang muncul terkait implementasi sistem zonasi menunjukkan adanya berbagai tantangan dan dinamika yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Secara keseluruhan, fenomena-fenomena tersebut menunjukkan bahwa meskipun sistem zonasi memiliki tujuan yang baik, implementasinya di lapangan masih memerlukan banyak perbaikan dan penyesuaian. Kecamatan Kramat Jati, yang terletak di wilayah Jakarta Timur, memiliki jumlah institusi pendidikan yang cukup beragam untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat setempat. Berdasarkan data Dinas Pendidikan, kecamatan ini memiliki puluhan sekolah dasar (SD), baik negeri maupun swasta, yang tersebar di berbagai kelurahan, termasuk Balekambang, Cililitan, dan Cawang. Sekolah-sekolah negeri menjadi pilihan utama masyarakat karena dianggap lebih terjangkau secara biaya, sementara sekolah swasta sering dipilih untuk menyediakan alternatif pendidikan dengan program unggulan tertentu. Namun, persebaran sekolah yang tidak merata di beberapa wilayah kecamatan ini menyebabkan perbedaan tingkat akses bagi peserta didik, terutama yang tinggal di area padat penduduk dengan minimnya fasilitas pendidikan. Hal ini menjadi tantangan utama dalam implementasi kebijakan zonasi, yang bertujuan untuk memastikan pemerataan akses pendidikan berkualitas di seluruh wilayah Kecamatan Kramat Jati.

Kecamatan Kramat Jati, yang terletak di Kota Administrasi Jakarta Timur, memiliki beragam institusi pendidikan baik negeri maupun swasta untuk mendukung kebutuhan belajar masyarakat di berbagai jenjang. Pada tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), mayoritas sekolah didominasi oleh swasta, mengingat minimnya jumlah TK negeri di wilayah ini. Untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), sekolah negeri lebih mendominasi dibandingkan swasta, mengingat keberadaan sekolah negeri menjadi pilihan utama masyarakat di daerah tersebut. Sementara itu, pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), jumlah sekolah negeri dan swasta cukup berimbang, memberikan alternatif pendidikan yang merata. Pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), jumlah sekolah negeri relatif lebih sedikit dibandingkan swasta, dengan fokus pada sekolah unggulan yang menjadi favorit siswa. Di sisi lain, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kramat Jati lebih didominasi oleh sekolah swasta yang menawarkan program keahlian bervariasi. Selain itu, terdapat beberapa Sekolah Luar Biasa (SLB) yang memberikan layanan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus, serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang menjadi solusi pendidikan nonformal untuk masyarakat yang tidak dapat mengakses pendidikan formal.

Tabel 1.1
Data Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta
Jenjang TK/SD/SMP/SMA/SMK/SLB/PKBM di Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi
Jakarta Timur

Kelurahan	TK		SD		SMP		SMA		SMK		SLB		PKBM	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
Balekambang	0	10	2	3	1	2	0	2	0	3	0	2	0	0
Batu Ampar	0	10	11	4	1	3	1	1	0	2	0	1	0	1
Cawang	0	4	5	3	0	5	0	1	2	1	0	0	0	0
Cililitan	1	11	3	4	1	1	1	1	0	2	0	0	0	1
Dukuh	0	4	5	0	2	1	0	1	0	2	0	1	0	1
Kramat Jati	1	10	10	1	3	2	1	1	0	3	0	0	0	2
Kampung Tengah	1	10	6	2	1	2	1	0	0	3	0	0	1	0
Jumlah	3	59	42	17	9	16	4	7	2	16	0	4	1	5

(Sumber : Data Statistik Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Kramat Jati Tahun 2024)

Kecamatan Kramat Jati memiliki total 59 sekolah untuk jenjang sekolah dasar yang tersebar di tujuh kelurahan, terdiri dari 42 sekolah negeri dan 17 sekolah swasta. Kelurahan Batu Ampar memiliki jumlah sekolah dasar negeri terbanyak, yakni 11 sekolah, diikuti oleh Kelurahan Kramat Jati dengan 10 sekolah negeri. Sementara itu, Kelurahan Dukuh menjadi satu-satunya wilayah tanpa sekolah swasta, meskipun memiliki 5 sekolah negeri. Kelurahan Balekambang tercatat memiliki 2 sekolah negeri dan 3 sekolah swasta, sedangkan Kelurahan Cililitan memiliki jumlah sekolah sebanyak 7 sekolah, yaitu 3 sekolah negeri dan 4 sekolah swasta. Di Kelurahan Cawang terdapat 5 sekolah negeri dan 3 sekolah swasta, dan di Kelurahan Kampung Tengah terdapat 6 sekolah negeri dan 2 sekolah swasta.

Data statistik penerimaan peserta didik baru dalam kurun waktu tahun 2019-2024 mengalami fluktuatif dikarenakan adanya hambatan dan kendala walaupun implementasi kebijakan zonasi sudah dijalankan. Jumlah siswa yang masuk dalam zonasi pada pelaksanaan PPDB di SD Negeri Balekambang 01 Pagi paling banyak 70 siswa pada PPDB tahun 2021 dan 2023 sedangkan siswa yang masuk dalam zonasi paling sedikit diterima pada PPDB tahun 2020 sebanyak 44 siswa dikarenakan pada tahun 2020 terjadi pandemi covid- 19, hal ini juga masuk dalam salah satu yang menghambat dikarenakan pelaksanaan belajar mengajar dilaksanakan secara daring dan juga menyebabkan terhambatnya implementasi kebijakan zonasi. Studi kasus di SD Negeri Balekambang 01 Pagi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tantangan dan peluang dalam implementasi kebijakan ini, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan kebijakan di masa depan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Santoso (2020), implementasi sistem zonasi di SD Negeri Balekambang 01 Pagi menghadapi berbagai hambatan, seperti ketidakpuasan orang tua dan ketidakmerataan fasilitas pendidikan. Selain itu, Dewi (2019) juga menyatakan bahwa sekolah ini merupakan contoh yang baik untuk mengkaji bagaimana kebijakan zonasi dapat diimplementasikan dalam konteks urban yang kompleks. Pelaksanaan implementasi kebijakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Tahapan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dituangkan dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 93 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025 dilaksanakan bulan Juni.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SD Negeri Balekambang 01 Pagi dan bagaimana kebijakan ini mempengaruhi penerimaan peserta didik baru serta tanggapan

dari masyarakat setempat. Berdasarkan dengan uraian latar belakang serta tabel dan grafik diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Studi Kasus di SD Negeri Balekambang 01 Pagi Kecamatan Kramat Jati”.

KAJIAN PUSTAKA

1. Implementasi : Menurut Edward III (2019): “Implementasi melibatkan aktivitas yang memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan dapat dioperasikan secara efektif oleh berbagai pihak yang terlibat.”
2. Kebijakan : Menurut Dye (2022): “Kebijakan adalah tindakan yang dipilih oleh pemerintah untuk mengatasi suatu masalah publik”
3. Zonasi : Khan (2021): “Zonasi merupakan upaya untuk mengelompokkan suatu wilayah agar pemanfaatannya sesuai dengan perencanaan tata ruang.”
4. Penerimaan Peserta Didik Baru : Kemdikbud (2021): “Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah proses seleksi calon siswa untuk masuk ke jenjang pendidikan tertentu, yang bertujuan untuk memastikan distribusi akses pendidikan yang adil dan berkualitas”
5. Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru : Menurut Arifin (2022) : “Sistem zonasi dalam PPDB di Indonesia bertujuan untuk mengurangi kesenjangan kualitas antar sekolah dan meningkatkan akses pendidikan bagi semua kalangan.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SD Negeri Balekambang 01 Pagi, Kecamatan Kramat Jati. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam dan menyeluruh terhadap proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yang sulit diukur dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami konteks, dinamika, dan nuansa yang ada dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi, serta mendapatkan perspektif dari berbagai pemangku kepentingan seperti kepala sekolah, guru, orang tua siswa, dan pejabat dinas pendidikan. Penelitian Kualitatif Menurut Prof. Dr. Mohammad Mulyadi, A.P., M.Si., “metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena atau realitas sosial melalui pengamatan, wawancara, atau analisis dokumen. Pendekatan ini menekankan pentingnya konteks, subjektivitas, dan proses dalam memahami pengalaman manusia secara komprehensif.”

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III yang menyoroti empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. George Edward III (2019) mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan, ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya, sikap dan komitmen pelaksana kebijakan, serta struktur birokrasi yang mendukung. Teori ini relevan dengan penelitian ini karena memberikan kerangka analitis yang komprehensif untuk mengevaluasi berbagai aspek yang mempengaruhi implementasi kebijakan sistem zonasi di SD Negeri Balekambang 01 Pagi. Merujuk pada literatur penelitian terdahulu, Anderson (2019) di Amerika Serikat dan Tan (2020) di Singapura menemukan bahwa komunikasi yang efektif dan ketersediaan sumber daya yang memadai merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan. Di Indonesia, Rahmawati (2019) dan Widiastuti (2020) menunjukkan bahwa sikap positif dan komitmen dari pelaksana kebijakan serta struktur birokrasi yang tidak berbelit-belit juga sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Wawancara mendalam akan dilakukan dengan kepala sekolah, guru, orang tua siswa, dan pejabat dinas pendidikan untuk mendapatkan pemahaman yang holistik tentang bagaimana kebijakan sistem zonasi diimplementasikan di SD Negeri Balekambang 01 Pagi, serta tantangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.

Observasi akan dilakukan untuk melihat langsung bagaimana kebijakan tersebut dijalankan di lapangan, sementara analisis dokumen akan melibatkan penelaahan berbagai dokumen kebijakan, laporan, dan catatan sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Komunikasi merupakan aspek utama dalam implementasi, yang melibatkan sosialisasi dengan masyarakat dan otoritas internal sekolah. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai metode, seperti partisipasi masyarakat, poster sekolah, dan media sosial sekolah. Efektivitas sosialisasi juga dipengaruhi oleh metode yang digunakan serta sasaran audiens yang dituju. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah telah memberikan informasi yang jelas tentang Sistem Manajemen Zonasi. Informasi ini bersumber dari berbagai pihak, seperti staf sekolah, pejabat sekolah, dan media sosial. Namun, tidak semua pejabat sekolah atau pemerintah dapat memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya komunikasi yang lebih efektif serta dukungan dalam implementasi Sistem Manajemen Zonasi.

Fokus penelitian ini adalah pemanfaatan optimal media sosial dalam memberikan informasi kepada masyarakat, dengan menekankan pentingnya literasi digital dalam pendidikan. Media sosial dianggap sebagai alat komunikasi yang efektif untuk menyebarkan informasi publik kepada masyarakat. Institusi sebaiknya menggunakan informasi yang relevan dan mudah dipahami agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat.

Penelitian ini juga menekankan pentingnya komunikasi yang teratur dan kolaboratif dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan di Indonesia. Studi ini menyarankan bahwa penggunaan strategi digital, keterlibatan komunitas lokal, dan komunikasi sosial yang rutin dapat meningkatkan pemahaman serta dukungan masyarakat terhadap pendidikan. Komite yang bertanggung jawab atas implementasi sistem sekolah meliputi kepala sekolah, dewan sekolah, dan gubernur sekolah. Mereka bertugas mengoordinasikan proses implementasi serta memastikan sistem sekolah berjalan dengan efektif.

Pembahasan

Bagian ini membahas hasil penelitian terkait implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SD Negeri Balekambang 01 Pagi, Kecamatan Kramat Jati, dengan mengacu pada teori George Edward III, literatur, dan temuan penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara mendalam dan kritis untuk menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan rekomendasi berdasarkan bukti empiris. Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi. Terkait Evaluasi Keberhasilan Implementasi Berdasarkan Teori George Edward III. Teori implementasi kebijakan George Edward III menyoroti empat elemen utama yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Evaluasi kebijakan zonasi di SD Negeri Balekambang 01 Pagi menunjukkan: 1) Komunikasi: Sosialisasi kebijakan zonasi telah dilakukan melalui media daring dan pertemuan langsung dengan orang tua. Namun, efektivitas komunikasi masih terbatas karena kurangnya akses informasi bagi masyarakat di wilayah pinggiran zonasi. Hal ini selaras dengan temuan penelitian Setiawan et al. (2020) yang menunjukkan bahwa komunikasi yang buruk menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan zonasi di daerah perkotaan. a) Kelebihan: Informasi kebijakan tersedia secara umum melalui situs resmi dan media sosial.

b) Kekurangan: Tidak semua orang tua memahami teknis pendaftaran karena kurangnya pendampingan personal. 2) Sumber Daya: Keterbatasan fasilitas sekolah, seperti jumlah ruang kelas dan guru, menjadi hambatan utama dalam penerapan kebijakan ini. SD Negeri Balekambang 01 Pagi hanya memiliki kapasitas terbatas untuk menampung siswa dari wilayah zonasi yang padat penduduk. Situasi ini serupa dengan penelitian Wicaksono (2021), yang menemukan bahwa 75% sekolah negeri di wilayah perkotaan mengalami kendala kapasitas. 3) Disposisi : Kepala sekolah dan guru mendukung kebijakan zonasi, namun terdapat resistensi dari sebagian staf administrasi karena beban kerja yang meningkat. Kesiapan sikap positif ini sesuai dengan temuan Handayani (2022), yang menekankan pentingnya pelatihan dan motivasi bagi pelaksana kebijakan. 4) Struktur Birokrasi:

Prosedur pendaftaran telah disederhanakan melalui sistem online. Namun, proses verifikasi data domisili masih membutuhkan waktu lama karena minimnya koordinasi antara sekolah dan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi perlu lebih adaptif, sebagaimana disarankan oleh studi Pratama dan Yusuf (2020).

Diskusi Faktor Pendukung dan Penghambat 1) Pendukung: a) Dukungan regulasi melalui Permendikbud No. 51 Tahun 2018. b) Motivasi dari tenaga pendidik untuk menjalankan kebijakan dengan baik. c) Kesadaran masyarakat yang semakin meningkat terkait pemerataan pendidikan. 2) Penghambat: a) Kapasitas fasilitas sekolah yang belum memadai. b) Sosialisasi kebijakan yang tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat. c) Ketimpangan kualitas sekolah di dalam dan luar zonasi. Analisis Kendala dan Hambatan terkait Penyebab Kendala Berdasarkan Elemen Teori George Edward III. 1) Komunikasi Sosialisasi kebijakan kurang terarah, terutama untuk orang tua dengan akses terbatas terhadap informasi digital. Hambatan ini serupa dengan yang ditemukan dalam penelitian Suryani (2021), di mana 60% orang tua di wilayah urban merasa kebijakan zonasi membingungkan. 2) Sumber Daya : Fasilitas sekolah belum memadai untuk menampung jumlah siswa yang meningkat pasca kebijakan zonasi. Guru juga belum mendapatkan pelatihan intensif terkait dinamika penerimaan siswa dari latar belakang beragam. 3) Disposisi : Resistensi dari pihak sekolah dan orang tua siswa terhadap kebijakan zonasi masih terjadi karena persepsi negatif terhadap efektivitas kebijakan ini. 4) Struktur Birokrasi : Kurangnya integrasi sistem antara pemerintah daerah dan sekolah menyebabkan proses verifikasi data lambat. Perbandingan dengan Studi Kasus Serupa di Sekolah Lain. Studi oleh Putra et al. (2022) di sekolah lain di wilayah urban menunjukkan pola kendala serupa, seperti minimnya fasilitas dan resistensi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan penelitian tentang implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SD Negeri Balekambang 01 Pagi, Kecamatan Kramat Jati, berikut adalah kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian ini: *Pertama* Efektivitas Komunikasi Kebijakan Zonasi Komunikasi kebijakan zonasi di SD Negeri Balekambang 01 Pagi berjalan cukup efektif dalam menjelaskan prosedur PPDB kepada masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat kebutuhan akan sosialisasi yang lebih intensif agar pemahaman masyarakat, khususnya calon orang tua siswa, dapat meningkat. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat menerima kebijakan zonasi dengan lebih positif. *Kedua* Ketersediaan Sumber Daya dan Dampaknya pada Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan zonasi di SD Negeri Balekambang 01 Pagi mengalami tantangan dalam hal keterbatasan fasilitas dan sumber daya untuk menampung jumlah siswa baru yang sesuai dengan ketentuan zonasi. Keterbatasan ini berdampak pada proses PPDB, dan diperlukan upaya untuk meningkatkan alokasi sumber daya, baik dari segi fasilitas fisik maupun dukungan finansial, agar kebijakan dapat diterapkan secara optimal. *Ketiga* Komitmen dan Disposisi Pelaksana Kebijakan. Kepala sekolah, guru, dan staf administrasi menunjukkan sikap positif dan komitmen yang kuat terhadap kebijakan zonasi. Komitmen ini merupakan faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Namun, diperlukan pelatihan tambahan dan dukungan dari Dinas Pendidikan agar para pelaksana kebijakan lebih siap dan efektif dalam menjalankan tugas mereka sesuai dengan regulasi terbaru. Kesimpulan ini memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan zonasi di sekolah, serta menyarankan peningkatan komunikasi, sumber daya, dan penguatan kapasitas pelaksana kebijakan sebagai langkah yang perlu dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan sistem zonasi di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. (2021). Pendidikan dan kebijakan publik: Teori, praktik, dan evaluasi (2nd ed.). Gadjah Mada University Press.
- Anderson, J. E. (2021). Public Policymaking: An Introduction. Houghton Mifflin Harcourt.
- Arifin, Z. (2022). Sistem Zonasi dalam PPDB: Kebijakan dan Implementasinya di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.

- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2017). *Qualitative research for education: An introduction to theories and methods* (6th ed.). Pearson.
- Braun, V., & Clarke, V. (2019). Reflecting on reflexive thematic analysis. *Qualitative Research in Psychology*, 16(2), 204-223. <https://doi.org/10.1080/14780887.2019.1628806>
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). Reflecting on Reflexive Thematic Analysis. *Qualitative Research in Psychology*, 18(3), 329-352.
- Braun, V., & Clarke, V. (2022). *Successful Qualitative Research: A Practical Guide for Beginners*. SAGE Publications.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). Sage Publications.
- Dewi, A. (2019). Tantangan Implementasi Sistem Zonasi di Sekolah Dasar Perkotaan. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik*, 15(2), 123-135.
- Dunn, W. N. (2019). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. Routledge.
- Dye, T. R. (2022). *Understanding Public Policy*. Pearson.
- Edward III, G. C. (2019). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Flick, U. (2018). *An introduction to qualitative research* (6th ed.). Sage Publications.
- Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (2018). Competing paradigms in qualitative research. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *The SAGE handbook of qualitative research* (pp. 105-117). Sage Publications.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (2020). *The Constructivist Credo*. Left Coast Press.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (2022). *The Handbook of Qualitative Research*. SAGE Publications.
- Grindle, M. (2021). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Handayani, R., Setiawan, I., & Pratiwi, A. (2023). Challenges in implementing zoning policies in Indonesian public schools. *Journal of Educational Equity*, 14(1), 76-89.
- Hidayat, R. (2018). Analisis Dampak Kebijakan Zonasi dalam Sistem Pendidikan. *Seminar Nasional Kebijakan Pendidikan*, Universitas Indonesia.
- Jabatan, S. (2020). *Reformasi pendidikan di Indonesia: Implementasi dan tantangan* (1st ed.). Nusa Media.
- Jansen, D., & Gunter, H. (Eds.). (2021). *Educational policy in developing countries: Theory and practice*. Routledge.
- Johnson, P. (2019). *The Principles of Zoning and Land Use Regulation*. Cambridge University Press.
- Khan, A. (2021). *Urban Planning and Zoning Policies*. Springer.
- Lasswell, H. D. (2020). *The Decision Process: Seven Categories of Functional Analysis*. University of Maryland Press.
- Lee, M. (2021). *School Admissions and Education Quality in Singapore*. Singapore: National Institute of Education Press.